

DAFTAR PUSTAKA

- Dalam Penjelasan Pasal 1 Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Data Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.
- Firdausy, Attina. 2018. “*Kualitas Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya*”.
- Gatot dan Supramono. 2013. “*Hukum Orang Asing di Indonesia*”. Jakarta Timur : Sinar Grafik.
- Graha, Nur Dwiki Rendra. 2019. Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing yang Melampaui Izin Tinggal Di Indonesia. Skripsi : (Universitas Jember, 2019).
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hopiana, Ayu. 2020 *Kreasi Kegiatan Menjahit Dalam Pengembangan Motoric Halus Anak Usia Dini*.(Universitas Pendidikan Indonesia) https://repository.upi.edu/56451/4/S_PAUD_1600875_Chapter3.pdf diakses 25 Januari 2024.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, “*Sejarah Kanim Blitar*” dalam <https://kanimblitar.kemenuham.go.id> diakses pada 25 Januari 2024.
- Monoarfa, Kennisa Dkk. “*Sanksi Atas Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*”.
- Muthmainnah, Ainun. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Orang Asing Yang Berada Di Wilayah Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 713/Pid.Sus/2022/PN.Mks). : Skripsi : Universitas Hasanuddin Makasar.
- Nabilla, Riza Safin. 2022. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember). Skripsi : Universitas Islam Negeri Kian Haji Achmad Siddiq Jember.
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.

- Pasal 101 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 113 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal, hal. 70
- Pasal 120 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 123 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 128 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 75 ayat (2 e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 80 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 80 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.

- Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 95 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 95 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Terkait Perpanjangan Visa Izin Tinggal Kunjungan.
- Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Pasal 98 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Prayulianda Helga Anton dan Antikowati. 2019. *“Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan”*.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmad Cendikia Indonesia.
- Sianturi, Binsar Bonardo dan Devina Yuka Utami. 2021. *“Pengawasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”*.
- Sihombing, Sinar Sihombing. 2013. *“Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia”* Nuansa Aulia : Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta.
- Widiyanti, Ayu. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang)*. Skripsi : UIN Walisongo Semarang.
- Yenseflirahmi, Tuti. 2021. *Penegakan Hukum Terhadap WNA Pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) Menurut UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekan Baru*. Skripsi : Universitas Islam Riau.